

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh:

Djoharis Lubis

FT – Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta

Jl. Arjona Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510

djoharis.lubis@plasa.com

ABSTRAK

Era Otonomi Daerah yang didasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah ternyata banyak membawa perubahan terhadap iklim kondusif untuk mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya jumlah dana untuk pembangunan daerah tertinggal.

Kata Kunci:

Pembangunan, Daerah Tertinggal, Otonomi Daerah

Pendahuluan

Jumlah Daerah Tertinggal menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sebanyak 199 Kabupaten/Kota. Rupanya Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah turut memberi kontribusi terhadap iklim percepatan pembangunan Daerah Tertinggal tersebut. Sesungguhnya, untuk mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal sejak Pemerintah Orde Baru sampai sekarang sudah banyak program-program Pemerintah yang diarahkan untuk mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal seperti Program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan P3DT (Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal). Namun pada saat itu tidak ada Kementerian/Lembaga yang khusus untuk menangani Pembangunan Daerah Tertinggal. Akibatnya Program2 Pembangunan Daerah Tertinggal tidak Fokus karena tidak ditangani secara professional dan kurang mengakomodasikan keinginan masyarakat setempat yang pada gilirannya Program IDT dan P3DT kurang berhasil mencapai sasaran. Pada masa lalu kita pernah mendengar masyarakat memplesetkan kata IDT menjadi “I ki Duitte Tekko“ (Ini Uangnya Datang) kemudian menjadi

I ki Duitte Tellas. (Ini Uangnya Habis). Selanjutnya IDT dirubah pola dan namanya menjadi PPK (Program Pengembangan Kecamatan). Hal ini menunjukkan pada masa Pemerintahan masa lalu belum ada “*Political Will* Pemerintah” yang kuat seperti Pemerintah saat ini membentuk Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Oleh sebab itu sangat tepat kalau dikatakan saat ini merupakan Era Kebangkitan Daerah Tertinggal karena dalam Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Kepemimpinan Nasional SBY – JK telah di bentuk Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang memiliki Program – Program “*Open Menu*” sesuai “*Need and Want*“ masyarakat setempat serta dana – dana pembangunan daerah tertinggal yang berasal dari APBN di bawah pengelolaan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tertinggal setempat atas dasar Proposal yang telah disetujui bersama di kombinasikan dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBD setempat. Berbagai program yang dikelola Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal saat ini adalah adalah :

1. Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP)
2. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)
3. Program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2 SEDT)
4. Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)
5. Program Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT)
6. Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT)

Dari berbagai program tersebut, tingkat keberhasilannya sejak tahun 2004 sampai 2007 telah dilakukan Evaluasi Paruh Waktu oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sbb: Tujuan dilakukannya evaluasi paruh waktu ini yaitu untuk mengetahui secara umum perkembangan posisi ketertinggalan suatu daerah.

Metode Penelitian

Data yang digunakan untuk pelaksanaan evaluasi ini berasal dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan:

1. Data Potensi Desa (PODES) 2003 dan 2006
2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2002 dan 2006.
3. Data Keuangan Kabupaten 2004 dan 2006.

Data-data yang dikumpulkan terkait dengan 6 (enam) kriteria dasar penetapan daerah tertinggal atau indeks ketertinggalan, yaitu: ekonomi, sumberdaya manusia, infrastruktur, keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah dilakukan perhitungan indeks ketertinggalan. Analisis data dilakukan dengan dua tahapan: *Tahap*

Pertama : Indeks Ketertinggalan

Cara ini dilakukan dengan menghitung indeks ketertinggalan relatif terhadap seluruh kabupaten/ kota dan mengelompokkan Daerah Tertinggal kedalam 5 (lima) derajat ketertinggalan, yaitu :

- Sangat Parah,
- Sangat Tertinggal,
- Tertinggal,
- Agak Tertinggal,
- Tidak Tertinggal/maju.

Nilai Indeks ketertinggalan dilihat perkembangannya yaitu dengan membandingkan kondisi Tahun 2004 dengan kondisi Tahun 2007.

Tahap Kedua : Posisi Kuadran

Cara ini dilakukan dengan melihat posisi kuadran daerah tertinggal serta membandingkan antara kondisi Tahun 2004 dengan kondisi Tahun 2007. Dengan melihat posisi kuadran ini maka: 1. akan diketahui pola pergerakan pembangunan daerah tertinggal. 2. memudahkan perumusan kebijakan, 3) memudahkan pengelompokkan

berdasarkan isu utama yaitu derajat ketertinggalan dan percepatan, dan 4) monitoring kebijakan.

Pengelompokkan kuadran didasarkan atas derajat ketertinggalan (sumbu x atau horizontal) dan perubahan indeks ketertinggalan (sumbu y atau vertikal). Posisi Daerah Tertinggal dibagi atas 4 (empat) kuadran.

Kwadran I: Daerah dengan tingkat pertumbuhan indeks tinggi dan kondisi daerah antara sangat tertinggal dan sangat parah

Kwadran II: Daerah dengan tingkat pertumbuhan indeks tinggi dan kondisi daerah antara agak tertinggal dan maju

Kwadran III: Daerah dengan tingkat pertumbuhan indeks rendah dan kondisi daerah antara agak tertinggal dan maju

Kwadran IV: Daerah dengan tingkat pertumbuhan indeks rendah dan kondisi daerah antara sangat tertinggal dan sangat parah

Hasil Evaluasi Indeks Ketertinggalan

Berdasarkan indeks ketertinggalan diketahui pada tahun 2004 terdapat kabupaten yang dikategorikan :

- Sangat Parah : ada 9 Kabupaten
- Sangat Tertinggal : ada 50 Kabupaten
- Tertinggal : ada 54 Kabupaten
- Agak Tertinggal. : ada 86 Kabupaten

Dan pada tahun 2007 terdapat kabupaten yang dikategorikan:

- Sangat Parah : ada 11 Kabupaten
- Sangat Tertinggal : ada 50 Kabupaten
- Tertinggal : ada 53 Kabupaten
- Agak Tertinggal. : ada 57 Kabupaten
- Tidak Tertinggal : ada 28 Kabupaten

Terdapat 28 kabupaten yang berdasarkan indeks masuk kategori daerah yang lepas dari ketertinggalan (tidak tertinggal) yaitu :

1. Madiun
2. Kuantan Singingi
3. Dharmasraya
4. Tana Toraja
5. Takalar
15. Pinrang
16. Bireuen
17. Bondowoso
18. Sambas
19. Kupang

6. Gunung Mas	20. Aceh Utara	Berdasarkan indeks ketertinggalan ada 2 kabupaten 1,0 %) yang mengalami kenaikan dua tingkat, 43 kabupaten (21,6 %) mengalami kenaikan 2 tingkat, 131" kabupaten (65,8 %) tidak mengalami perubahan, 22 kabupate'n (11,1 %) mengalami penurunan satu tingkat, dan 1 kabupaten (0,5 %) yang mengalami penurunan dua tingkat (Lihat Tabel 1).
7. Aceh Tengah	21. Malinau	
8. Situbondo	22. Barito Kuala	
9. Pamekasan	23. Nunukan	
10. Jayapura	24. Aceh Besar	
11. Bangkalan	25. Wonogiri	
12. Kutai Barat	26. Karangasem	
13. Pidie	27. Beutung	
14. Natuna	28. Lahat	

Tabel 1
Perbandingan Kondisi Tahun 2004 dengan Tahun 2007
Berdasarkan Indeks Ketertmggialan

Kondisi	Jumlah (Kab)	%	Nama Kabupaten
Naik dua tingkat	43	21,6	Madiun, Kuantan Singingi, Dharmasrayo. Tana Toraja. lakalar, Aceh Tengah, Situbondo, Pasaman Barat, Maluku lenggaro. Kolaka Utara, Marnuju Ufara. Pocitan, Nagun Raya, Bener Meriah, Bengkulu Selaian. Majene. Aceh Barat Daya, Buru, Maluku Tengah, Seluma, Sumbawa Barat, Sompang, Boven Digoel, Mappi, Kutai Barat, Pidie, Natuna. Pinrang, Bireuen. Bondowoso. Sambas, Kupang, Aceh Utara, Malinau, Barito Kuala, Nunukan, Aceh Besar, Wonogiri. Karangasem. Belitung, Lohat.
Tidak berubah	131	65,8	Pandeglang, Rokan Hulu, Barru, Nias Selatan, Lampung Timur, Barito Selatan, Kolaka, Keiapang, Kulonprogo, Solok, Banyu Asin, Trenggalek, Musi Rawas, Pangkajene Kepulauan, Kepahiang, Enrekang, Lampung utara, Aceh Tamiang, Nias, Pakpak Bharat, Samosir, Sawahlunto/ Sijunjung, Sumbawo, Selayar, Toli-toli, Konawe, Kep. Talaud, Jeneponto, Fakfak, Kep. Songihe, Bima, Aceh Barat, Aceh Selatan, Parigi Mouiong, Landak, Lebong, Kaur, Yapen Waropen, Gorontalo, Aceh Singkil, Poleweii Mandar, Biak Numfor. Bone Bolango, Lombok Barat, Poso. Rote Ndao, Pohuwato, Gayo Lues. Boalemo, Kep. Aru. Seram Bagian Firnur. Lembata, Sumba Barat. Nabire, Teluk Wondama, Asmat, Teluk Bintinu, Puncak Jaya. Rembang, Konawe Selatan, Wakatabi, Garut, Lebak, Sukabumi, Bengkulu Utara, Haimahera Barat, Padang Pariaman. Bantaeng. Bangka Selatan, Kapuas Hulu, Pulang Pisau, Rejang Lebong, Sorolangun, OKI, Tanjung Jabung Timur, Muna, Lamandau. Dairi, Ogan Ilir. Bulukumba, Sanggou, Banggai. Belifung Timur, OKU Selatan. Gunung Kidul, Sintang. Banjar Negara, Lampung Selatan, Bengkayang. sinjai, Luwu Timur, Haimahera Selatan, Melawai. Muko-muko, Sekadau, Sorong Seiatan. Luwu. Lampung Barat, Sukamara, Buol, Way Kanan. Hulu Sungai Utara, Pesistr Selatan, Kep. Sula, Tapanuli Tengah, Morowalli, Donggala, Seruyan, Lombok Tengah, Tojo Una una, Simeuleu, Manggarai, Timor Tengah Utara, Belu, Supiori, Aceh Jaya, Sarmi, Mimika. Raja ampat, Sikka, Seram Bagian Barat, Sumba Timur. Waropen. Timor Tengah Selatan, Jaya Wijaya, Aior. Mamasa. Paniai, Pegunungan

			Bintang, Yahukimo.
Turun satu tingkat	22	11,1	Bombana, Pasaman, Merauke, Ngada, Haimahera Utara. Solok Selatan, Sorong, tnde, Keerom, Katingan, Mamuju, Kep. Mentawai, Lombok Timur, Halmaher Timur, Aceh Timur. Banggai Kepulauan, Flores Timur. Haimahera Tengah, Kaimana, Manggarai Barat, Toli Kara, Maluku Tenggara Barat,
Turun dua tingkat	1	0,5	Buton
Total	199	100,0	

Sumber: Hasil Olahan Data

Pada tahun 2007 posisi kuadran daerah tertinggal diketahui sebagai berikut:

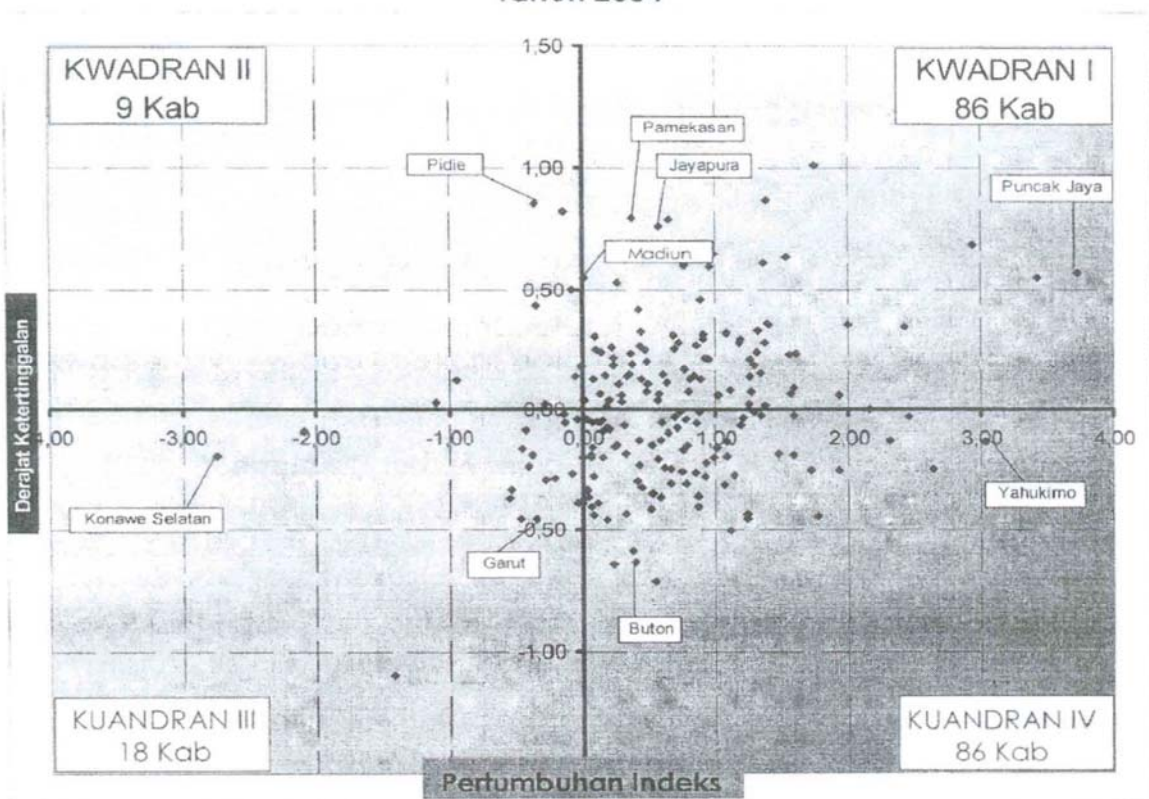
• Kwadran I : ada 75 Kabupaten

• Kwadran II : ada 20 Kabupaten

• Kwadran III : ada 13 Kabupaten

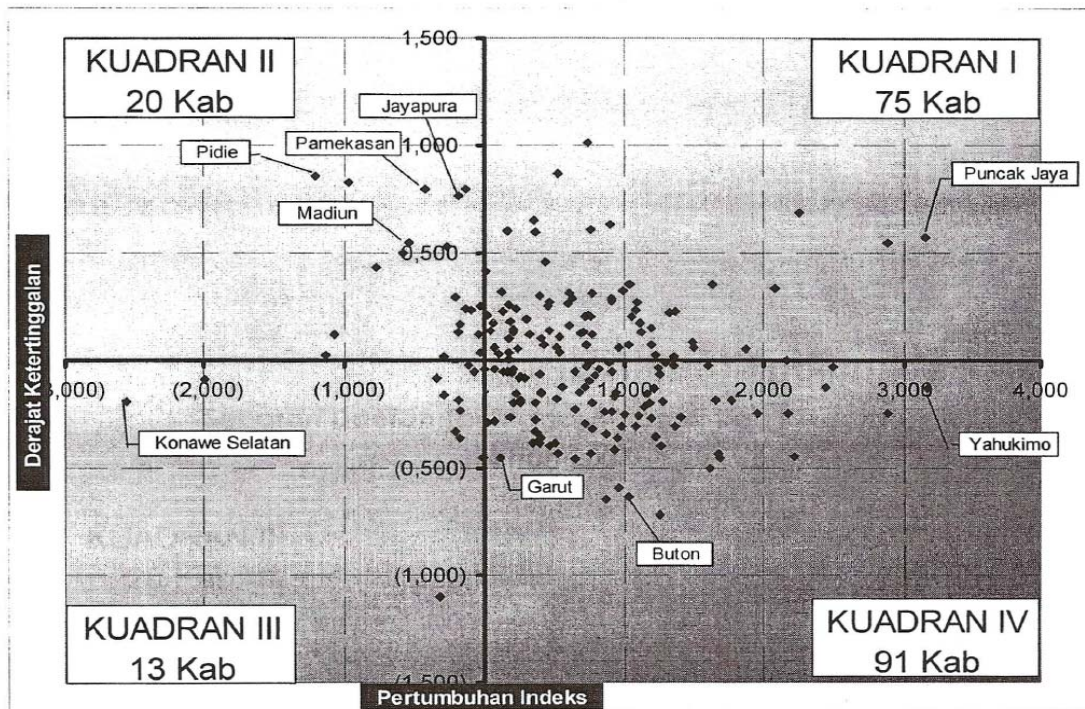
• Kwadran IV : ada 91 Kabupaten

Gambar 1
Sebaran Daerah Tertinggal Berdasarkan Kwadran
Tahun 2004



Sumber: Hasil Olahan Data

Gambar 2
Sebaran Daerah Tertinggal Berdasarkan Kwadran
Tahun 2007



Sumber: Hasil Olahan Data

Dari tahun 2004 ke tahun 2007 berdasarkan posisi kuadran ada 11 Kabupaten (5,5%) yang mengalami kenaikan. 183 Kabupaten (92,0%) tetap, 5 Kabupaten (2,5%) turun kuadran (lihat table 2).

Kabupaten-Kabupaten yang berada di kuadran II dan Kuadran III (33 Kabupaten pada tahun 2007) memiliki potensi terentaskan lebih cepat sebagai daerah tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten yang berada di kuadran I dan IV. Kabupaten-Kabupaten yang ada di kuadran II yaitu:

1. Madiun
2. Kuantan Singingi
3. Dharmasraya
4. Tana Toraja
5. Takalar
6. Gunung Mas
7. Aceh Tengah
8. Situbondo
9. Pamekasan
10. Jayapura

11. Bangkalan
12. Rembang
13. Kutai Barat
14. Pidie
15. Natuna
16. Pinrang
17. Bireuen
18. Bondowoso
19. Sambas
20. Kupang

Kabupaten-Kabupaten yang ada di kuadran III yaitu:

1. Konawe Selatan
2. Wakatobi
3. Aceh Utara
4. Malinau
5. Barito Kuala
6. Nunukan
7. Aceh Besar
8. Wonogiri
9. Karangasem

10. Bombana
11. Belitung

12. Lahat
13. Padang Pariaman

Tabel 2

Perbandingan Kondisi Tahun 2004 dengan Tahun 2007 Berdasarkan Kuadran

Kondisi	Jumlah (Kab)	%	Nama Kabupaten
Naik Kuadran	11	5,5	Madiun, Kuantan Singingi, Dharmasraya, Tana Toraja, Takalar, Gunung Mas. Aceh Tengah. Pamekasan. Jayapura, Bangkalan,
Tetap	183	92,0	Pandeglang, Rokan Hulu, Barru, Nias Selatan, Lampung Timur, Barifo Selatan, Kolaka, Ketapang, Kulon Progo, Soioek, Banyuasin, Trenggalek, Musi Rawas, Pangkejene Kepulauan, Kepahiang, Enrekang, Lampung Utara, Aceh Tamiang, Nias, Pakpak Bharat, Samosir. Sawah Lunto/Sijunjung, Sumbawa, Selayar, Pasaman Barat, Toli-toM , Maluku Tenggara, Kolaka Utara, Mamuju Utara, Paci'an, Konawe, Kep. Ialau, Jenepono. fakfak. Kep. Sangihe, Bima. Nagan Raya. Aceh Barat, Aceh Selatan, Parigi Moutong, landak. Bener Meriah, Lebong. Bengkulu Selatan, Majene, Aceh Barai Daya, Kaur, Buru, Maluku Tengah, Yapen Waropen, Gorontalo, Aceh Singkil, Polewali Mandar, Biak Numfor, Bone Bolango, Seluma, Lornbok Barat Sumbawa Barat. Poso, Rote Ndao. Sampang, Pohuwato, Gayo Lues, Boven Digoel, Boalemo, Kep. Aru , Seiarn bagian Timur , Lembata, Mappi, Sumba Barat, Nabire. Teluk Wondama. Asmat, Teiuk Bintuni. Funcak Jaya. Rembang. Kutai Barat, Pidie. Natuna, Pinrang, Bireuen, Bondowoso, Sambas, Kupang, Konawe Selatan, Wakatobi, Aceh Utara, Malinau, Barito Kuala, Nunukan, Aceh Besar. Wonogiri, Karangasem, Bombana, Belitung, Lahat, Padang Pariaman, Bantaeng. Bangka Selatan, Kapuas Hulu. Pulang Pisau. Rejang Lebong. Saralangan. OKI, Tanjung jabung Timur. Muda, Lamandau, Dairi. Ogan Ilir, Buiukumba, Pasaman. Sanggau. Banggai. Beitung Timur . OKU Setatan, Gunung Kidul, Sintang, Banjar Neara, Merauke. Lampung Seiatan, Ngada , Bengkulu, Sinjai. Luwu Timur, Halmahera Utara. Solok Selatan, Sorong. Buton, Ende, Keerom, Katingan, Mamuju. Halmahera Selatan, Melawai, Mukomuko, Kep. Menfawai, Sekadau. Sorong Selatan. Luwu, Lampung Barat, Sukamara, Buol. Way Kanan , Hulu Sungai Utara, Pesisir Selatan, Kep. Sula, Tapanuli Tengah, Lombok Timur, Morowali. Donggala, Halmahera Timur, Seruyan, Aceh Timur, Dompu, Banggai Kepulauan, Flores Timur, Lombok tengah, Halmahera Tengah, Kaimana. Manggarai Barat, Timor Tengah Utara, Belu, Supiori, Aceh jaya. Sarmi, Mimika, Raja Ampat, Sikka. Seram Bagian Barat, Sumba Timur, Waropen, Timor Tengah Selatan, Jayawijaya, Tolikara, Maluku Tenggara Barat, Alor, Mamasa, Pania, <u>Pegunungan</u> Bintang, Yahukimo.
Turun Kwadran	5	2,5	Garut. Lebak, Sukabumi, Bengkulu Utara, Halmahera Barat
Total	199	100,0	

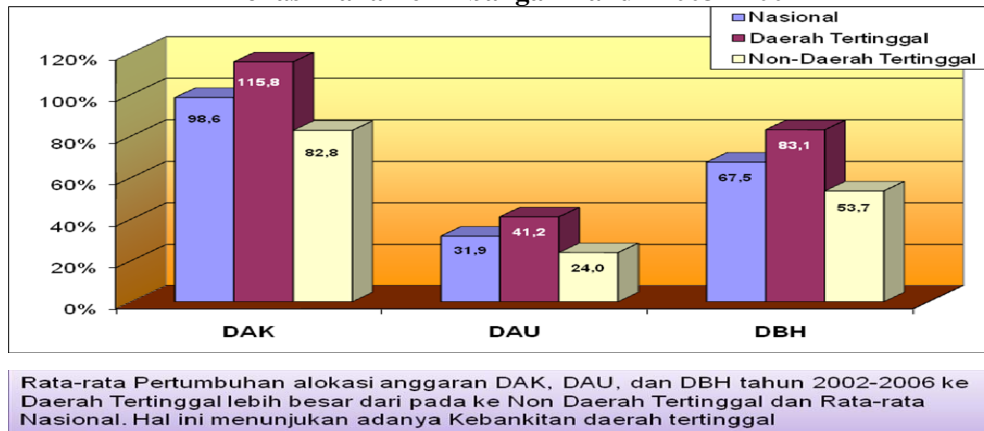
Sumber: Hasil Olahan Data

33 kabupaten yang potensial lebih cepat terentaskan sebagai Daerah Tertinggal (Kuadran II dan III) perlu mendapatkan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan atau faktor penyebab ketertinggalannya. Faktor penyebab ketertinggal suatu daerah terdiri atas 6 (enam) faktor atau kurang, yaitu: perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Dengan intervensi yang terintegrasi dari seluruh kementerian/lembaga dan daerah diharapkan

daerah-daerah tersebut dapat berubah status menjadi Daerah tidak tertinggal/maju.

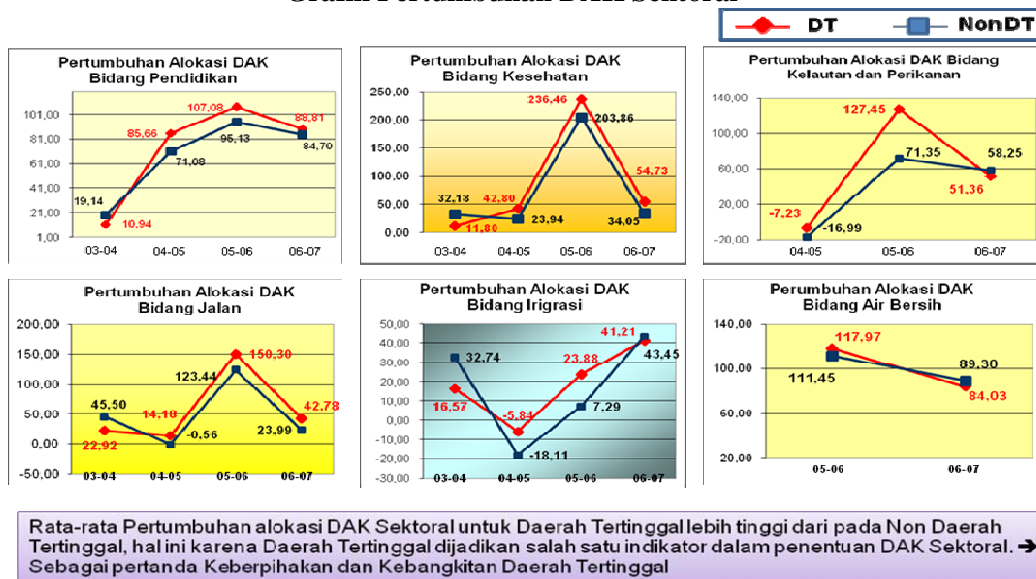
KPDT saat ini sedang melakukan kajian dalam rangka mereformulasi indikator penetapan daerah tertinggal, hal ini dimaksudkan agar ke depan akan diperoleh indikator yang lebih tajam dan sensitif didalam penetapan daerah tertinggal. Dan indikator yang digunakan tersebut merupakan indikator yang diakui secara internasional. Dalam rangka melaksanakan Program – Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dimaksud Secara grafik perkembangan pendanaan untuk pembangunan daerah tertinggal sbb:

Grafik Perbandingan Rata-Rata Pertumbuhan Alokasi Dana Perimbangan Tahun 2003 - 2007



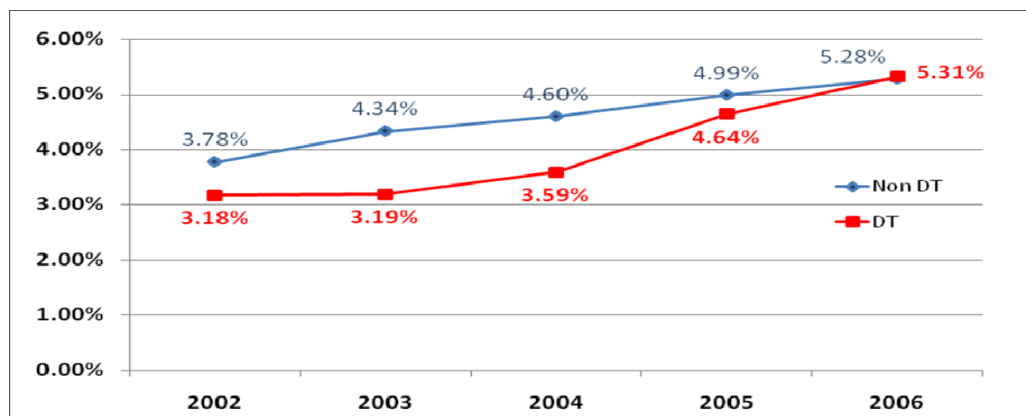
Sumber: Hasil Olahan Data

Grafik Pertumbuhan DAK Sektoral



Sumber: Hasil Olahan Data

GRAFIK PERTUMBUHAN PDRB



Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Daerah Tertinggal pada tahun 2002 s/d 2005 lebih rendah dari pada Daerah Maju. Namun pada tahun 2006 laju pertumbuhan PDRB Daerah Tertinggal telah melampaui Daerah Maju walaupun belum cukup signifikan untuk menyamai kondisi daerah maju. Hal ini sekali lagi menunjukkan adanya Kebangkitan Daerah Tertinggal, Sebagai salah satu hasil Kabinet Indonesia Bersatu.

Sumber: Hasil Olahan Data

Untuk mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran, maka pada Tahun 2008 ini mulai dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Target pembangunan daerah tertinggal yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun 2008 melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah sbb :

1. PNPM Mandiri – Perdesaan mencakup 2.389 Kecamatan dengan sasaran 12.045 Desa Tertinggal.
2. PNPM Mandiri – Perkotaan mencakup 955 Kecamatan dengan 1.528 Desa Tertinggal.
3. PNPM Mandiri – Desa Tertinggal mencakup 158 Kecamatan dengan 1.044 Desa Tertinggal.
4. PNPM Mandiri – Infrastruktur Perdesaan mencakup 486 Kecamatan dengan 1800 Desa Tertinggal.

Untuk mencapai target-target tersebut di atas pemerintah pada tahun 2008 telah mengalokasikan

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 6,56 Trilyun. Disamping itu berbagai Departemen teknis lainnya seperti Departemen Pertanian, Deapartemen Sosial serta Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Melalui Program – Progman Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun 2008 telah menetapkan Sasaran kualitatif masing – masing PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL sebagai mana dapat dilihat pada table 3.

Untuk melaksanakan Program –Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut, telah dialokasikan dana melalui APBN 2008 sebesar Rp.1,024 Trilyun. Dalam pada itu juga akan dikembangkan Model – Model Inkubator Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tertingall seperti di Kanero Kabupaten Tolikara, Propinsi Papua.

Tabel 3
Sasaran Kualitatif Program

NO	PROGRAM	SASARAN KWALITATIF
1	Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)	memfasilitasi pengembangan kawasan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hutan tanaman industri, dan industri pengolahan di daerah tertinggal
2	Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT)	membangun pusat pertumbuhan sumber daya lokal di daerah tertinggal, dan meningkatkan sinergi pembangunan antara daerah
3	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT)	penyediaan prasarana & sarana sosial dasar di perdesaan
4	Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP)	mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah perbatasan
5	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)	mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memantapkan kehidupan sosial ekonomi, daerah-daerah tertinggal dan perbatasan
6	Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT)	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya pembangunan

Sumber: Hasil Olahan Data]

Kesimpulan

Era Kebangkitan Daerah Tertinggal di tandai oleh:

1. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan Nasional Presiden SBY dan Wapres JK, telah di bentuk Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang khusus ditugaskan melaksanakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini merupakan pertanda kuatnya “Political Will Pemerintah Saat ini “untuk melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
2. Hasil Evaluasi Paruh Waktu yang dilaksanakan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan dalam kurun waktu tahun 2004 – 2007, berdasarkan indeks ketertinggalan 199 Kabupaten tertinggal, ada 2 Kabupaten yang naik dua tingkat dan 43 Kabupaten naik satu tingkat. Ini menunjukkan adanya kebangkitan Daerah Tertinggal.
3. Dari sisi pendanaan (Periksa Grafik di atas), Rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) , Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2006 – 2006 ke Daerah Tertinggal lebih besar ke Non Daerah Tertinggal dan rata2 nasional. Demikian juga rata-rata pertumbuhan DAK Sektoral untuk Dae-

rah Tertinggal lebih tinggi dari Non Daerah Tertinggal.

4. Berdasarkan Grafik yang telah diutarakan di atas, pada Tahun 2006, rata-rata Pertumbuhan PDRB Daerah Tertinggal telah melampaui Daerah Maju .
5. Pada Tahun 2008, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat telah dialokasikan dana Bantuan Langsung sebanyak Rp 6,56 Trilyun dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebanyak Rp 1,024 Trilyun.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Berbantuan.
- Buku Pegangan Tahun 2006, Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah, Sekretariat Negara RI Tahun 2006.

Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 001/KEP/M-
PDT/II/2005, Tanggal 7 Februari 2005
Tentang Strategi Nasional Pembangunan
Daerah Tertinggal

Rencana Aksi Nasional Pembangunan Daerah
Tertinggal Tahun 2006, Kementerian
Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Hasil Evaluasi Paruh Waktu Pembangunan Daerah
Tertinggal, Kementerian Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal.